

2. CONSUMER PROTECTION

Per 5/1/00

mu

P

SKRIPSI

ELISABETH DINA IRAWATI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK ATAS PENGUNAAN KARTU KREDIT YANG BERMASALAH



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK ATAS PENGUNAAN KARTU KREDIT YANG BERMASALAH SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

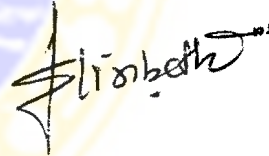
Dosen Pembimbing,



Sri Handajani, S.H., M.Hum.

NIP : 130 809 069

Penyusun,



Elisabeth Dina Irawati

(039514237)

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan tentang kartu kredit tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UU 7/92, Kepres no 61 tahun 1988, Keputusan Menteri Keuangan no 1251/KMK.013/1988 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan no 468/KMK.017/1995 hanya disinggung sedikit tentang kartu kredit. Untuk mengantisipasi tidak adanya peraturan tentang kartu kredit ini maka para pihak membuat suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang merupakan implementasi kebebasan berkontrak dalam pasal 1338(1) BW. Perjanjian yang dibuat para pihak ini biasanya dalam perjanjian standart yang memberikan kedudukan yang lebih kuat pada bank dibandingkan dengan debitur, namun meskipun kedudukan bank lebih kuat dibandingkan dengan nasabah ternyata pada saat penyelesaian tagihan debitur, bank berada dalam kedudukan yang lemah.
- b. Upaya preventif bank dengan mengadakan penseleksian secara ketat tentang calon cardholdernya yang kadang pada beberapa bank hal ini kurang dilaksanakan ternyata masih menimbulkan banyaknya tagihan kartu kredit yang bermasalah dan klausula-

klausula perjanjian penerbitan kartu kredit yang biasanya berupa perjanjian baku karena sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak bank yang mengatur ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap bank ternyata ada yang kurang lengkap mengatur hal-hal dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan kartu kreditnya, misalnya dalam hal debitur meninggal dunia tidak jelas disebutkan bagaimana penyelesaian tagihannya, penyelesaiannya hanya berdasarkan praktek bank yang tidak tertulis bahwa bank akan membebaskan kepada keluarga terdekat dan tidak mengatur bagaimana seandainya ahli waris mempergunakan haknya untuk berpikir yaitu apakah akan menerima warisan, menolak warisan maupun penerimaan secara benifisier yang mempunyai konsekwensi yang berbeda terhadap perlindungan hukum terhadap bank, dalam hal debitur wanprestatie maupun tidak mampu membayar sedangkan debitur mempunyai harta kekayaan yang cukup sebagai pelunasan hutangnya, hal inipun penyelesaiannya menghindari upaya penyelesaian dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dan hanya menyelesaikan berdasarkan praktek/kebijaksanaan bank sehari-hari yang kadang dapat membuat kedudukan bank sebagai kreditur tidak cukup kuat dalam pelunasan tagihan kartu kredit debitur/cardholder.